

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Negeri Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Batam. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batam, 30 April 2022
Direktur,



Dr. Uuf Brajawidagda
NIP. 197603112015041001

8 A

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Reviu SPI	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan SAIBA
2. Neraca SIMAK BMN
3. Berita Acara Stock Opname Persediaan
4. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara
5. Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal KPPN
6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan
7. Berita Acara Cash Opname
8. Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2021
9. SK Piutang SPP Mahasiswa
10. Daftar Memo Penyesuaian
11. Laporan Saldo Rekening & Rekap Rekening Satuan Kerja
12. Laporan Barang Milik Negara
13. Lampiran Pendukung Audit
14. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
15. SK Pejabat Perbendaharaan
16. Nota Kepemahaman Terkait Tanah
17. Kerjasama Batamindo
18. Daftar Gedung dan Bangunan yang belum dilakukan serah terima tahap II

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 30 April 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Uuf Brajawidagda
NIP. 197608112015041001 *Uuf*

Laporan Keuangan *Audited* Politeknik Negeri Batam Tahun 2021 DIPA 023.018.677620 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 58.676.758.018 atau mencapai 100.17 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 58.577.454.000.

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 166.757.644.584 atau mencapai 97.46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 171.108.239.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp391.240.932.713 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.749.390.472, Aset Tetap sebesar Rp389.052.693.264 dan Aset Lainnya sebesar Rp438.848.977.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.803.351.153 dan Rp381.437.581.560.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp56.697.361.777, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp119.545.110.707 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp62.847.748.930 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp2.400.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp62.850.148.930.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp333.367.464.166 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp62.850.148.930 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp481.841.107 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp110.438.425.217 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp381.437.581.560.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK yaitu penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 December 2021		% thd Angg	31 December 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	58.577.454.000	58.676.758.018	100,17	40.847.535.832
JUMLAH PENDAPATAN		58.577.454.000	58.676.758.018	100,17	40.847.535.832
BELANJA	B.2.				
Rupiah Murni					
Belanja Pegawai	B.2.1	15.218.292.000	14.756.495.502	96,97	10.062.836.484
Belanja Barang	B.2.2	73.895.133.000	70.417.361.018	95,29	59.395.472.592
Belanja Modal	B.2.3	14.406.536.000	13.995.699.599	97,15	12.143.527.338
Pinjaman dan Hibah					
Belanja Barang	B.2.4	1.031.478.000	1.031.478.000	100,00	50.980.680
Belanja Modal	B.2.5	66.556.800.000	66.556.610.465	100,00	
JUMLAH BELANJA		171.108.239.000	166.757.644.584	97,46	81.652.817.094

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

POLITEKNIK NEGERI BATAM
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	1.514.713.960	388.352.760
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	106.575.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	339.300.000	339.300.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	(339.300.000)	(339.300.000)
Piutang Bukan Pajak (Neto)		-	-
Persediaan	C.5	128.101.512	122.161.470
Jumlah Aset Lancar		1.749.390.472	510.514.230
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.6	409.181.577.127	368.165.418.429
Gedung dan Bangunan	C.7	290.927.127.315	253.715.820.315
Aset Tetap Lainnya	C.8	24.791.404.358	23.820.046.858
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(335.847.415.536)	(307.987.191.935)
Jumlah Aset Tetap		389.052.693.264	337.714.093.667
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	10.799.564.782	10.701.874.782
Aset Lain-lain	C.11	1.633.489.704	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(11.994.205.509)	(8.005.356.776)
Jumlah Aset Lainnya		438.848.977	2.696.518.006
JUMLAH ASET		391.240.932.713	340.921.125.903
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	433.846.153	233.464.678
Pendapatan Diterima Dimuka	C.14	9.369.505.000	7.320.197.059
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.803.351.153	7.553.661.737
JUMLAH KEWAJIBAN		9.803.351.153	7.553.661.737
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	381.437.581.560	333.367.464.166
Jumlah Ekuitas		381.437.581.560	333.367.464.166
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		391.240.932.713	340.921.125.903

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	56.697.361.777	33.524.818.773
JUMLAH PENDAPATAN		56.697.361.777	33.524.818.773
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	14.756.495.502	10.062.836.484
Beban Persediaan	D.3	2.467.646.354	1.913.760.680
Beban Barang dan Jasa	D.4	59.958.522.890	51.656.535.731
Beban Pemeliharaan	D.5	7.873.633.216	5.553.680.627
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.424.101.191	734.526.430
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	33.064.711.554	12.162.139.560
JUMLAH BEBAN		119.545.110.707	82.083.479.512
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(62.847.748.930)	(48.558.660.739)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	-
Surplus / Defisit Penyelesaian		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36.663.300	335.041.215
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		39.063.300	14.895.490
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		(2.400.000)	320.145.725
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(62.850.148.930)	(48.238.515.014)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK NEGERI BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	333.367.464.166	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(62.850.148.930)	(48.238.515.014)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	481.841.107	(258.311.881)
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap Lainnya	E.3.1	(541.285.895)	(52.800)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2	1.478.285.115	-
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(455.158.113)	(258.259.081)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	110.438.425.217	381.864.291.061
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	-	48.070.117.394	333.367.464.166
EKUITAS AKHIR	E.5	381.437.581.560	333.367.464.166

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

A.1. Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 295/KMK.6/2019 Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
18. Surat Edaran Nomor S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat Covid-19
19. Surat Edaran Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
20. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan dengan Mekanisme First In First Out (FIFO)

A. 1. 2 Profil dan Kebijakan Teknis Akuntansi Politeknik Negeri Batam

Dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan Politeknik Negeri Batam sebagai salah satu jenis perguruan tinggi jalur vokasi adalah:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam

Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Tahun 2015-2019 disusun sejalan dan mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan kemudian diturunkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Visi Politeknik Negeri Batam adalah menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan

industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045. Sedangkan Misi Politeknik Negeri Batam adalah Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, terdapat tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Batam yaitu:

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

Untuk mencapai masing-masing tujuan strategis tersebut ditetapkan sasaran-sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya mutu, akses, relevan dari layanan, sumber daya dan output pembelajaran vokasi.
2. Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi, hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan inovasi.
3. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas, berorientasi kelestarian lingkungan, mutu layanan dan tata kelola organisasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sampai dengan 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Akuntansi Politeknik Negeri Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Negeri Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Negeri Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sampai dengan 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Batam. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Batam adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

A.5.1 Pendapatan- LRA

LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima Kas Umum Negara. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

A.5.2 Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

A.5.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

A.5.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

A.5.5 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Lancar

A.5.5.1 Aset Lancar

Aset ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas Politeknik Negeri Batam terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara penerimaan, dan saldo uang tunai.

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

a. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk.

b. Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

c. Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan (Neraca) pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.

2. Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya per tanggal neraca. Pendapatan pendidikan di Politeknik Negeri Batam diakui sebagai piutang pendidikan jika mahasiswa belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan sebelum dilaksanakan ujian akhir semester.

Piutang diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dengan menerbitkan surat penagihan (SPn), didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Pengungkapan kualifikasi kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan (SPn) Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Persediaan

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Politeknik Negeri Batam. Suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Politeknik Negeri Batam.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan.

Persediaan merupakan aset berwujud dan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Barang habis pakai
2. Barang tak habis pakai
3. Barang bekas pakai

Contoh: Barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku, cadangan pangan, obat-obatan, bahan praktikum, bahan bakar minyak.

a. Pengakuan

Berdasarkan Basis Akrual persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Politeknik Negeri Batam dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah, dokumen sumber untuk mencatat transaksi persediaan masuk adalah kuitansi pembayaran dan atau Surat Perintah Membayar (SPM), serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukan pada saat persediaan dikirim oleh supplier yang disertai dokumen surat jalan.
- Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah (kuantitas) tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada tiap bulan.

b. Pengukuran

Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan.

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- Politeknik Negeri Batam menggunakan alat bantu aplikasi persediaan dalam mencatat dan menatausahakan barang persediaan. Aplikasi ini diwajibkan untuk dipakai di seluruh unit kerja yang berada di bawah koordinasi dengan Eselon I.

c. Perhitungan Biaya Persediaan

- Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*).
- Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat distribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dapat dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Aset Tetap

A.5.6 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Politeknik Negeri Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibagikan kepada masyarakat, tetapi digunakan dalam kegiatan operasional dan kegiatan operasional pihak lain selama hak kepemilikan tidak berpindah tangan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah); dan

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan, Serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan Dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

A.5.7 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.5.8 Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

A.5.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Klasifikasi konstruksi dalam pengerjaan meliputi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Contoh kontrak konstruksi misalnya konstruksi gedung, konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi jaringan listrik dan internet.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa perencanaan

dan jasa arsitektur.

- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset.
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*.
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Aset Lainnya

A.5.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

A.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

• **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

• **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

A.7 Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Politeknik Negeri Batam telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 12 kali dari DIPA awal. Kenaikan pagu PNBPN karena penerimaan PNBPN Politeknik Negeri Batam telah melampaui target penerimaan PNBPN TA 2021, sehingga dilakukan revisi untuk penambahan pagunya sesuai realisasi. Kenaikan pagu belanja pegawai karena adanya tambahan gaji PPPK sebanyak 73 orang. Kenaikan pagu belanja barang karena dilakukan revisi penambahan pagu yang bersumber dari PNBPN, revisi dimungkinkan untuk dilakukan karena realisasi penerimaan PNBPN Politeknik Negeri Batam telah melebihi target penerimaan PNBPN TA 2021. Kenaikan pagu belanja modal karena dilakukan revisi penambahan pagu yang bersumber dari PNBPN, revisi dimungkinkan untuk dilakukan karena realisasi penerimaan PNBPN Politeknik Negeri Batam telah melebihi target penerimaan PNBPN TA 2021.

Rincian DIPA awal dan perubahan akhir sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,820,590,000	58,577,454,000
Jumlah Pendapatan	23,820,590,000	58,577,454,000
Belanja		
Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	13,478,292,000	15,218,292,000
Belanja Barang	46,674,238,000	73,895,133,000
Belanja Modal	71,011,983,000	14,406,536,000
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang	-	1,031,478,000
Belanja Modal	-	66,556,800,000
Jumlah Belanja	131,164,513,000	171,108,239,000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp58.676.758.018

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Politeknik Negeri Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp58.676.758.018 atau mencapai

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

100.17 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp58.577.454.000 Pendapatan Negara dan Hibah Politeknik Negeri Batam terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Pendapatan pendidikan, sumbangan Pengembangan Instansi, Ujian Masuk/ Pendaftaran, pendidikan lainnya (kerjasama, pergantian buta warna, Kartu tanda mahasiswa dan denda perpustakaan), Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang lalu.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	2021		
	Est Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Biaya Pendidikan	57,573,030,000	57,573,030,905	100%
Pendapatan Pendidikan Lainnya	144,524,000	144,524,000	100%
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	859,900,000	859,900,000	100%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	2,000,000	100%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	60,639,813	100%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	36,663,300	100%
Jumlah	58,577,454,000	58,676,758,018	100.17%

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi s.d 31 Desember 2021	Realisasi s.d 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Biaya Pendidikan	57.573.030.905	39.204.093.176	47%
Pendapatan Pendidikan Lainnya	144.524.000	638.883.000	-77%
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	859.900.000	973.632.753	-12%
Pendapat Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.000.000	19.000.000	-89%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	60.639.813	9.406.903	545%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.663.300	2.520.000	1355%
Jumlah	58.676.758.018	40.847.535.832	44%

Realisasi Pendapatan Politeknik Negeri Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 44% persen karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun ini.

Realisasi Pendapatan pendidikan s.d 31 Desember 2021, disebabkan antara lain:

1. Pendapatan Biaya Pendidikan sampai 31 Desember 2021 sebanyak 5.037 orang berupa SPP dan pengenaan Sumbangan Pengembangan Instansi bagi mahasiswa baru untuk pengembangan infrastruktur di Politeknik Negeri Batam.
2. Pendidikan lainnya berupa kerjasama, pergantian buta warna, Kartu tanda mahasiswa dan denda perpustakaan
3. Pendapatan Ujian Masuk sampai 31 Desember 2021 sebanyak 5.347 peserta

Realisasi Belanja Negara Rp166.757.644.584

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Politeknik Negeri Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp166.757.644.584 atau 97.46 persen dari anggaran belanja sebesar Rp171.108.239.000.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	sampai dengan 31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	15,218,292,000	14,756,495,502	96.97%
Belanja Barang	73,895,133,000	70,417,361,018	95.29%
Belanja Modal	14,406,536,000	13,995,699,599	97.15%
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Barang	1,031,478,000	1,031,478,000	100%
Belanja Modal	66,556,800,000	66,556,610,465	100%
Total Belanja Kotor	171,108,239,000	166,757,644,584	97.46%
Pengembalian	-	22,994,900	-
Jumlah	171,108,239,000	166,734,649,684	97.44%

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi anggaran mencerminkan kemampuan Politeknik Negeri Batam dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan secara efisien dan efektif.

Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi s.d 31 Desember 2021	Realisasi s.d 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	14,756,495,502	10,062,836,484	46.64%
Belanja Barang	70,417,361,018	59,395,472,592	18.56%
Belanja Modal	13,995,699,599	12,143,527,338	15.25%
Pinjaman dan Hibah			
Belanja Barang	1,031,478,000	50,980,680	1923.27%
Belanja Modal	66,556,610,465	-	
Jumlah	166,757,644,584	81,652,817,094	104.23%

Realisasi Belanja sampai 31 Desember 2021 sebesar 104,23% persen karena realisasi pendapatan tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai
Rp14.756.495.502

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.756.495.502 dan Rp10.062.836.484. Realisasi Belanja Pegawai sampai 31 Desember 2021 sebesar 96,97 persen.

Perbandingan Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	Desember		Naik (Turun) %
	2021	2020	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	5.287.552.660	4.455.168.780	18,7%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	96.699	80.889	19,5%
Belanja Tunj Suami/Istri PNS	383.941.548	314.021.864	22,3%
Belanja Tunj Anak PNS	108.845.630	84.168.924	29,3%
Belanja Tunj Struktural PNS	3.240.000	46.980.000	-93,1%
Belanja Tunj Fungsional PNS	717.050.000	594.530.000	20,6%
Belanja Tunj PPh PNS	6.188.000	1.946.038	218,0%
Belanja Tunj Beras PNS	369.486.840	284.972.700	29,7%
Belanja Uang Makan PNS	1.025.015.000	916.109.000	11,9%
Belanja Tunj Umum PNS	106.550.000	114.535.000	-7,0%
Belanja Tunj Profesi Dosen	2.193.943.240	1.737.520.600	26,3%
Jumlah	10.201.909.617	8.550.033.795	19,3%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PN	825.078.600	802.732.000	2,8%
Jumlah	825.078.600	802.732.000	2,8%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK			
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.080.712.500	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.793	-	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	83.104.050	-	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	25.111.440	-	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	130.175.000	-	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	77.489.400	-	
Belanja Uang Makan PPPK	248.161.000	-	
Jumlah	1.644.773.183	-	-
Belanja Lembur			
Belanja Uang Lembur	10.368.000	2.790.000	271,6%
Belanja Uang Lembur PPPK	8.993.000	-	
Jumlah	19.361.000	2.790.000	593,9%
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Trans			
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	919.173.117	707.280.689	30,0%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.146.199.985	-	
Jumlah	2.065.373.102	707.280.689	192,0%
Total	14.756.495.502	10.062.836.484	46,6%

Belanja Barang
Rp71.448.839.018

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp71.448.839.018 dan Rp59.395.472.592. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 terdiri dari belanja barang rupiah murni sebesar Rp70.417.361.018, belanja barang pinjaman dan hibah sebesar Rp1.031.478.000. Realisasi Belanja Barang sampai 31 Desember 2021 sebesar 95,29 persen.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Perbandingan Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2021 2021	Desember 2020 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional			
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,233,947,766	19,665,606,116	-7%
Belanja Keperluan Perkantoran	5,494,945,413	5,354,983,437	3%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,761,067	4,071,213	238%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24,386,500	-	-
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	50,242,000	-	-
Jumlah	23,817,282,746	25,024,660,766	-5%
Belanja Barang Non Operasional			
Belanja Bahan	2,208,439,471	1,723,758,035	28%
Belanja Honor Output Kegiatan	17,890,084,881	12,650,787,528	41%
Belanja Non Operasional Lainnya	7,119,785,031	5,554,651,454	28%
Jumlah	27,218,309,383	19,929,197,017	37%
Belanja Barang Persediaan			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	293,955,600	286,465,600	3%
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	54,000,000	14,700,000	267%
Belanja Barang Persediaan Lainnya	4,964,083,060	2,341,717,885	112%
Jumlah	5,312,038,660	2,642,883,485	101%
Belanja Jasa			
Belanja Langganan Listrik	2,885,075,616	2,763,130,098	4%
Belanja Langganan Telepon	41,381,966	39,504,643	5%
Belanja Langganan Air	86,262,905	88,291,280	-2%
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,111,443,067	1,863,950,759	67%
Belanja Sewa	830,636,595	771,833,737	8%
Belanja Jasa Profesi	1,507,235,944	1,009,359,850	49%
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	140,826,693	-	-
Jumlah	8,602,862,786	6,536,070,367	32%
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,343,057,632	2,925,106,283	-20%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,129,614,460	622,409,000	81%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,105,737,560	820,288,924	35%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	495,834,600	211,311,000	135%
Jumlah	5,074,244,252	4,579,115,207	11%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri			
Belanja Perjalanan Biasa	1,138,887,191	649,632,155	75%
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	57,266,000	14,925,000	284%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	227,948,000	7,505,000	2937%
Jumlah	1,424,101,191	672,062,155	112%
Belanja Perjalanan Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri	-	51,275,259	-100%
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	-	11,189,016	-100%
Jumlah	-	62,464,275	-100%
Total	71,448,839,018	59,446,453,272	20%

Belanja Barang menggunakan akun pencegahan dan penganggulangan *pandemic Covid19* sebesar Rp191.068.693 yang terdiri dari belanja barang operasional-penanganan pandemi covid sebesar Rp50.242.000 berupa daya tahan tubuh, belanja jasa penanganan *pandemic covid19* sebesar Rp140.826.693 berupa test PCR.

Belanja Modal**Rp80.552.310.064****B.2.3 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp80.552.310.064 dan Rp12.143.527.338. Belanja Modal Tahun 2021 terdiri dari belanja modal rupiah murni sebesar Rp13.995.699.599, belanja modal pinjaman dan hibah sebesar Rp66.556.610.465. Realisasi Belanja Modal sampai 31 Desember 2020 sebesar 97.15% persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi s.d 31 Desember 2021	Realisasi s.d 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,529,136,564	11,040,777,338	285%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37,547,912,000	-	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	176,146,000	1,102,750,000	-84%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	198,000,000	-	
Belanja Modal Lainnya	101,115,500	-	
Jumlah Belanja Kotor	80,552,310,064	12,143,527,338	563%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	80,552,310,064	12,143,527,338	563%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.514.713.960*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.514.713.960 dan Rp388.352.760. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas berasal dari Dana Titipan dan hibah.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2021

URAIAN	Nilai
Sisa Dana Hibah ILO 2021	1.376.741.960
Dana Titipan	137.972.000
Jumlah Belanja	1.514.713.960

Sisa Dana Hibah ILO 2021 sebesar Rp1.376.741.960, terdiri dari belanja yang barang yang belum disahkan sebesar Rp388.352.760 dan sebesar Rp988.389.200 berada di rekening RPL PDHL, Dana Titipan MBA ITB sebesar Rp120.000.000 dan dana titipan lainnya sebesar Rp17.972.000.

*Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp106.575.000*

C.2 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 106.575.000 dan Rp0. Pendapatan diterima dimuka ini dikarenakan adanya cicilan mahasiswa yang belum dibayarkan, batas waktu pembayarannya bulan januari karena tanggal kalender akademik untuk semester ganjil yaitu Agustus 2021- Januari 2022.

*Piutang Bukan Pajak
Rp339.300.000*

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp339.300.000 dan Rp339.300.000. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang PNBPN merupakan SPP Mahasiswa yang dinyatakan berhutang pada periode tertentu dan belum diajukan ke Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN) menyebabkan belum adanya penghapusan piutang di Politeknik Negeri Batam. Piutang tersebut merupakan piutang pendidikan sebanyak 283 mahasiswa D3 dan D4 dari TA 2009 sampai dengan TA 2015 (SK rincian piutang terlampir).

Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 1677/K/PL29/XII/2021 tentang Piutang SPP Mahasiswa Politeknik Negeri Batam Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih –

Piutang Bukan Pajak

Rp339.300.000

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp339.300.000 dan Rp339.300.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Uraian	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Piutang Pendidikan	-	0,50%	-
Kurang Lancar	Piutang Pendidikan	-	10%	-
Diragukan	Piutang Pendidikan	-	50%	-
Macet	Piutang Pendidikan	339.300.000	100%	339.300.000
Jumlah		339.300.000		339.300.000
Jumlah		339.300.000		339.300.000

Penyisihan piutang tak tertagih katagori macet berasal dari piutang pendidikan dari Tahun Ajaran 2009 sampai dengan Tahun Ajaran 2015. Sejak tahun 2016 piutang Politeknik Negeri Batam berkomitmen melakukan penataan piutang mahasiswa yang lebih baik.

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Persediaan

Rp128.101.512

C.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp128.101.512 dan Rp122.161.470. Nilai persediaan ini berasal dari Transfer Masuk dari Menko Bidang Perekonomian sebesar Rp15.842.630 dan pembelian sebesar Rp 112.258.882.

Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis	31-Dec-21	31-Dec-20
Barang Konsumsi	123.123.012	117.397.670
Barang untuk Pemeliharaan	2.781.000	3.458.300
Suku Cadang	1.305.000	205.000
Bahan Baku	38.000	152.000
Persediaan Lainnya	854.500	948.500
Jumlah	128.101.512	122.161.470

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan Berita Acara stock opname terlampir.

Peralatan dan Mesin

Rp409.181.577.127

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp409.181.577.127 dan Rp368.165.418.429.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Saldo Awal	368.165.418.429	2.687.943.520
Mutasi Tambah :		
Pembelian	102.085.424.838	809.683.944
Transfer Masuk	-	-
Hibah Masuk	-	-
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	102.085.424.838	809.683.944
Mutasi Kurang :		
Pengurangan	61.069.266.140	370.022.444
Jumlah Mutasi Kurang	61.069.266.140	370.022.444
Saldo Akhir 31 Desember 2021	409.181.577.127	3.127.605.020

Rincian penambahan Aset Peralatan dan Mesin yaitu pembelian modal

peralatan dan mesin sebesar Rp409.181.577.127 dengan ekstrakomptable sebesar Rp3.127.605.020. Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN.

*Gedung dan
Bangunan
Rp290.927.127.315*

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp290.927.127.315 dan Rp253.715.820.315.

Rincian Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Saldo Awal	253.715.820.315	7.810.000
Mutasi Tambah :		
Pembelian	76.234.004.650	-
Transfer masuk		-
Pengembangan Nilai Aset		
Jumlah Mutasi Tambah	76.234.004.650	-
Mutasi Kurang :		
Pengurangan	39.022.697.650	-
Jumlah Mutasi Kurang	39.022.697.650	-
Saldo Akhir 31 Desember 2021	290.927.127.315	7.810.000

Rincian Aset Gedung dan Bangunan yaitu terdiri dari Saldo Awal Intrakomptable sebesar Rp253.715.820.315, pembelian modal Gedung dan bangunan sebesar Rp76.234.004.650, pengurangan sebesar Rp39.022.697.650 dan saldo awal ekstrakomptable sebesar Rp7.810.000. Rincian Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN.

*Aset Tetap Lainnya
Rp24.791.404.358*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp24.791.404.358 dan Rp23.820.046.858. Terdiri dari Aset Tetap dalam renovasi sebesar Rp22.974.803.400 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.816.600.958.

Rincian Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable	Gabungan
Aset Tetap Dalam Renovasi	22.974.803.400		22.974.803.400
Aset Tetap Lainnya	1.816.600.958	484.300	1.817.085.258
Total	24.791.404.358	484.300	24.791.888.658

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp335.847.415.536*

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp335.847.415.536 dan Rp307.987.191.935. Terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp314.776.838.061, penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp20.990.817.576 dan penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp79.759.899.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	409.181.577.127	314.776.838.061	94.404.739.066
2	Gedung dan Bangunan	290.927.127.315	20.990.817.576	269.936.309.739
3	Aset Tetap Dalam Renovasi	22.974.803.400	68.329.899	22.906.473.501
4	Aset Tetap Lainnya	1.816.600.958	11.430.000	1.805.170.958
Akumulasi Penyusutan		724.900.108.800	335.847.415.536	389.052.693.264

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN.

Aset Tak Berwujud
Rp10.799.564.782

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp10.799.564.782 dan Rp10.701.874.782. Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud berasal dari pembelian sebesar 97.690.000. Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN

Aset Lain Lain
Rp1.633.489.704

C.11 Aset Lain Lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp1.633.489.704 dan Rp0. Rincian Aset lain-lain disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, bagian Laporan BMN

Akumulasi Penyusutan
/ Amortisasi Aset
Lainnya
Rp11.994.205.509

C.12 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp11.994.205.509 dan Rp8.005.356.776. Terdiri dari penyusutan untuk software sebesar Rp9.238.770.182 dan lisensi sebesar Rp1.128.945.623.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp433.846.153

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp433.846.153 dan Rp233.464.678. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Politeknik Negeri Batam per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

No	Keterangan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
1	Biaya Listrik	287.438.682
2	Biaya Air	6.110.100
3	Biaya Telepon	2.325.371
4	Dana Titipan MBA ITB	120.000.000
5	Dana Titipan Lainnya	17.972.000
Total		433.846.153

Pendapatan Diterima Dimuka **C. 14 Pendapatan Diterima Dimuka**

Dimuka

Rp9.369.505.000

Pendapatan diterima dimuka merupakan Pendapatan yang diperoleh sebelum memberikan jasa layanan. Tahun Ajaran Akademik semester ganjil 2021 di Politeknik Negeri Batam adalah bulan Agustus 2021 – Januari 2022. Nilai pendapatan diterima dimuka selama 1 bulan yaitu Januari sebesar Rp9.369.505.000

Ekuitas

Rp381.437.581.560

C. 15 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp381.437.581.560 dan Rp333.367.464.166. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Rp56.697.361.777

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp56.697.361.777 dan Rp33.524.818.773. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Biaya Pendidikan	55,630,297,964	31,883,896,117	74%
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	859,900,000	973,632,753	-12%
Pendapatan Pendidikan Lainnya	144,524,000	638,883,000	-77%
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	2,000,000	19,000,000	-89%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	60,639,813	9,406,903	545%
Jumlah	56,697,361,777	33,524,818,773	69%

Perbedaan antara realisasi Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp58.676.758.018 dengan Laporan Operasional sebesar Rp56.697.361.777 disebabkan oleh adanya Perbedaan Pendapatan Pendidikan sebesar Rp1.942.732.941 terdiri dari jurnal balik pendapatan di terima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp7.320.197.059, ditambahkan dengan pendapatan yang masih harus di terima sebesar Rp106.575.000 dikurangi dengan Pendapatan diterima dimuka tahun ini sebesar Rp9.369.505.000 dan Penerimaan Kembali Belanja barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp36.663.300 berupa pengembalian gaji pegawai.

Beban Pegawai

Rp14.756.495.502

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Pegawai yang berstatus PNS sebanyak 128 orang, CPNS sebanyak 8 orang, PPPK sebanyak 73 orang dan jumlah pegawai yang belum PNS sebanyak 155 orang dosen dan tendik, 23 orang pengamanan dalam dan 59 tenaga kebersihan. Jumlah Beban Pegawai

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.756.495.502 dan Rp10.062.836484. Rincian beban pegawai sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	5.287.552.660	4.455.168.780	18,68%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	96.699	80.889	19,55%
Belanja Tunj Suami/Istri PNS	383.941.548	314.021.864	22,27%
Belanja Tunj Anak PNS	108.845.630	84.168.924	29,32%
Belanja Tunj Struktural PNS	3.240.000	46.980.000	-93,10%
Belanja Tunj Fungsional PNS	717.050.000	594.530.000	20,61%
Belanja Tunj PPh PNS	6.188.000	1.946.038	217,98%
Belanja Tunj Beras PNS	369.486.840	284.972.700	29,66%
Belanja Uang Makan PNS	1.025.015.000	916.109.000	11,89%
Belanja Tunj Umum PNS	106.550.000	114.535.000	-6,97%
Belanja Tunj Profesi Dosen	2.193.943.240	1.737.520.600	26,27%
Jumlah	10.201.909.617	8.550.033.795	19,32%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	825.078.600	802.732.000	2,78%
Jumlah	825.078.600	802.732.000	2,78%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK			
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.080.712.500	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.793	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PPPK	83.104.050	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	25.111.440	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	130.175.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	77.489.400	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	248.161.000	-	-
Jumlah	1.644.773.183	-	-
Belanja Lembur			
Belanja Uang Lembur	10.368.000	2.790.000	271,61%
Belanja Uang Lembur PPPK	8.993.000	-	-
Jumlah	19.361.000	2.790.000	593,94%
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Transito			
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	919.173.117	707.280.689	29,96%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.146.199.985	-	-
Jumlah	2.065.373.102	707.280.689	192,02%
Total	14.756.495.502	10.062.836.484	46,64%

Beban

Persediaan

Rp2.467.646.354

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan sampai

dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.467.646.354 dan Rp1.913.760.680.

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	965.064.488	764.575.200	26,2%
Beban persediaan Bahan Baku	1.496.841.866	1.147.406.480	30,5%
Beban Persediaan Lainnya	5.740.000	1.779.000	222,7%
Jumlah	2.467.646.354	1.913.760.680	28,9%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp59.958.522.890*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp59.958.522.890 dan Rp51.656.535.731.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	5.494.945.413	5.339.268.457	2,92%
Belanja Penambah daya Tahan Tubuh	24.386.500	-	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.761.067	4.071.213	238,01%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.233.947.766	19.665.606.116	-7,28%
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	50.242.000	-	
Beban Bahan	2.208.439.471	1.723.758.035	28,12%
Beban Honor Output Kegiatan	17.890.084.881	12.650.787.528	41,41%
Beban Barang Non Operasional	7.119.785.031	5.554.651.454	28,18%
Beban Langganan Listrik	2.949.480.125	2.740.539.526	7,62%
Beban Langganan Telepon	41.133.532	38.657.412	6,41%
Beban Langganan Air	84.516.305	86.934.680	-2,78%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.111.443.067	1.863.950.759	66,93%
Beban Sewa	830.636.595	771.833.737	7,62%
Beban Jasa Profesi	1.507.235.944	1.009.359.850	49,33%
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid	140.826.693	-	
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	257.658.500	207.116.964	24,40%
Total	59.958.522.890	51.656.535.731	16,07%

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Belanja Barang menggunakan akun belanja barang operasional – Penanganan *Pandemic Covid 19* sebesar Rp50.242.000 untuk penambah daya tahan tubuh dan bahan habis. Belanja Jasa - Penanganan *Pandemic Covid 19* sebesar Rp140.826.693 berupa test kesehatan (PCR).

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp7.873.633.216

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.873.633.216 dan Rp5.553.680.627

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,343,057,632	2,925,106,283	-19.90%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,431,300	8,161,400	40.07%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,076,927,460	820,288,924	31.29%
Beban Persediaan suku cadang	4,442,216,824	1,800,124,020	146.77%
Total	7,873,633,216	5,553,680,627	41.77%

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas

Rp1.424.101.191

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.424.101.191 dan Rp734.526.430.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,138,887,191	649,632,155	75.31%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	57,266,000	14,925,000	283.69%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	227,948,000	7,505,000	2937.28%
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	-	51,275,259	-100.00%
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	11,189,016	-100.00%
Total	1,424,101,191	734,526,430	93.88%

Beban

*Penyusutan dan
Amortisasi*

Rp33.064.711.554

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp33.064.711.554 dan Rp12.162.139.560. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.064.505.493	9.542.393.620	131,23%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.073.193.815	2.590.719.307	134,42%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	56.983.266	22.776.633	150,18%
Jumlah Penyusutan	28.194.682.574	12.155.889.560	131,94%
Beban Amortisasi Software	4.533.623.176	6.250.000	72437,97%
Beban Amortisasi Lisensi	332.825.804		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	3.580.000	-	
Jumlah Amortisasi	4.870.028.980	6.250.000	77820,46%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	33.064.711.554	12.162.139.560	171,87%

Defisit dari

*Kegiatan Non
Operasional*

Rp2.400.000

D.8 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.400.000 dan Rp320.145.725 .

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan non operasional			
Penerimaan kembali belanja pegawai	-	2,520,000	-100%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	36,663,300	-	
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	332,521,215	-100%
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,663,300	335,041,215	-89%
Beban dari kegiatan non operasional			
Beban penyesuaian nilai persediaan	-	14,895,490	-100%
Beban Persediaan Rusak/Usang	39,063,300	-	
Jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya	39,063,300	14,895,490	162%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2,400,000)	320,145,725	-101%

Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp333.367.464.166

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp333.367.464.166 dan Rp0.

Defisit LO
Rp62.850.148.930

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp62.850.148.930 dan Rp48.238.515.014 . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang mengurangi Ekuitas
Rp481.841.107

E.3 Koreksi yang mengurangi Ekuitas

Koreksi yang mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp481.841.107 dan Rp258.311.881. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi atas reklasifikasi, Koreksi Atas Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi dan koreksi lain-lain.

Rincian Koreksi yang mengurangi Ekuitas 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Atas Reklasifikasi	(541.285.895)
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	1.478.285.115
Koreksi Lain-lain	(455.158.113)
Jumlah	481.841.107

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya sebesar Rp541.285.895 terdiri dari Reklas Keluar dan Reklas Masuk , Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp1.478.285.115 terdiri dari koreksi nilai asset tetap non revaluasi sebesar (Rp1.025.804.836) dan koreksi nilai asset lainnya non revaluasi sebesar Rp2.504.089.951, Koreksi Lain-lain sebesar Rp455.158.113 yang merupakan pengesahan hibah tahun yang lalu.

Transaksi Antar Entitas

Rp110.438.425.217

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp110.438.425.217 dan Rp381.864.291.061. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	165.549.366.584
Diterima dari Entitas Lain	(58.676.758.018)
Transfer Masuk	23.518.527.545
Transfer keluar	(23.502.684.915)
Pengesahan Hibah Langsung	3.094.815.908
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	455.158.113
Jumlah	110.438.425.217

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp165.549.366.584.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp58.676.758.018).

E.4.3 Transfer Masuk

Transfer Masuk pada periode hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp23.518.527.545 terdiri dari Transfer Masuk dari sub satker Politeknik Negeri Batam ke satker induk Politeknik Negeri Batam sebesar Rp23.502.684.915 dan Transfer Masuk dari Menko Bidang Perekonomian sebesar Rp15.842.630.

E.4.4 Transfer Keluar

Transfer Keluar pada periode hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp23.502.684,915 berasal dari satker induk Politeknik Negeri Batam ke sub satker Politeknik Negeri Batam.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung pada periode hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp3.094.815,908 terdiri dari hibah uang (Hibah ILO) sebesar Rp2.196.667,200 dan hibah barang sebesar Rp898.148.708.

E.4.6 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Tahun yang lalu pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp455.158,113 yang merupakan hibah *seaseac* yang baru di sahkan di tahun ini.

Ekuitas Akhir
Rp381.437.581.560

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp381.437.581.560 dan Rp333.367.464.166.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi hal penting setelah tanggal Neraca di Politeknik Negeri Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 152211/A.A2/KU/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Politeknik Negeri Batam dan Surat Keputusan KPA No. 002/K/PL29/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2020.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Uuf Brajawidagda
Pejabat Pembuat Komitmen	: 1. Fuliza Lubis 2. Bambang Hendrawan
Pejabat Penandatanganan SPM	: Dewi Aprilianingrum
Bendahara Pengeluaran	: Ratna Juwita
Bendahara Penerimaan	: Tira Juliana

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71827/MPK.A/KU/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152211/A.A2/KU/2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Batam, Memberhentikan Priyono Eko Sanyoto dan Mengangkat Uuf Brajawidagda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /Barang pada Politeknik Negeri Batam.

1. DIPA awal satker Politeknik Negeri Batam sebesar Rp131.164.513.000 mengalami revisi sebanyak 12 kali menjadi Rp171.108.239.000. mengalami perubahan karena buka blokir pagu BOPTN, tambahan tukin, pengurangan pagu PNBPN karena penanganan akun covid19, penambahan pagu PNBPN sebanyak 2 kali, p3tv, penambahan pagu serdos, pengesahan hibah dan pmutakhiran pok akhir tahun.
2. Serapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar Rp166.757.644.584 dari alokasi anggaran sebesar Rp171.108239.000 atau sebesar 97.46% dari anggaran.
3. Belum selesainya serah terima Tahap II terkait Gedung dan Bangunan dari BP Batam kepada Politeknik Negeri Batam, rincian terlampir.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021 Politeknik Negeri Batam (023.018.677620)

4. Status kepemilikan lahan dan bangunan di Batam memiliki keunikan tersendiri. Di Batam tanah melainkan hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB) Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam. Pengelolaan tanah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jalur Vokasi yang dilaksanakan Politeknik Negeri Batam didukung dengan nota kesepahaman antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. Pengesahan belanja hibah ILO untuk triwulan IV belum disahkan karena masih dalam proses verifikasi dan masih menunggu persetujuan ILO. Belanja yang belum disahkan sebesar Rp 388.352.760
6. Pendanaan Belanja Gedung dan Bangunan berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang digunakan untuk pembangunan Gedung Technopreneur Center. Untuk Pengerjaan Bangunan Gedung Technopreneur Center dan Peralatan Laboratorium dan Meubelair Pendukung Pembelajaran Gedung Technopreneur sebesar Rp66.397.810.465 telah selesai 100% dengan Nomor BAST untuk Bangunan Gedung Technopreneur Center BAST62/PPK.-techno/PL29/XII/2021 dan Nomor BAST Peralatan Laboratorium dan Meubelair Pendukung Pembelajaran Gedung Technopreneur BAST22/PPK.alat/PL29/XII/2021.
7. Terjadi perubahan nilai akumulasi penyusutan pada Peralatan dan Mesin, Akumulasi Amortisasi Software dan Akumulasi Amortisasi Lisensi hal ini dikarenakan adanya update aplikasi simak untuk proses K3 pada asset.